



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No. : 5261 /D.V/08/2015

Jakarta, 19 Agustus 2015

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : **PERMOHONAN NARASUMBER DISKUSI**

Kepada Yth.  
Prof Dr. Rifaldi (Universitas Riau)  
di  
**TEMPAT**

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan konsep Pembangunan Kelautan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia, yang merupakan salah satu isu strategis dalam Pembangunan Jangka Menengah, dengan ini dimohon kesediaan Bapak untuk menjadi **Narasumber Focus Group Discussion Regional Barat**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2015

Waktu : 08.00 – 13.00 WIB

Tempat : Ruang VIP Academic Activity Centre (AAC) Unsyiah  
Jln. Teuku Nyak Arief Banda Aceh, Propinsi Aceh

Topik : *"Pengembangan Ekonomi Berbasis Kelautan,  
Untuk Mendukung Terwujudnya Indonesia menjadi  
Poros Maritim: Pendayagunaan Ekonomi Sumberdaya  
Kelautan"*

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kesediaanya,  
Kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang SDA dan LH Bappenas



**Endah Murniningtyas**

**Term of Reference  
FGD REGIONAL BARAT**

**PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS KELAUTAN  
UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA INDONESIA  
MENJADI POROS MARITIM DUNIA :  
PERSPEKTIF DAERAH**

**I. Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia ini telah mencanangkan visi besar bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia. Visi ini didasari dengan beberapa keunggulan strategis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, diantaranya yaitu letak geografis Indonesia yang sangat strategis, diapit dua samudra besar yaitu Samudera Pasifik Ocean dan Samudera Hindia, luas wilayah lautan hampir 2/3 dari total luas Indonesia, jumlah pulau lebih dari 17.500 buah pulau, dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia (setelah Amerika, Canada dan Rusia) dengan panjang lebih dari 95.000 kilometer.

Dengan luas laut sebesar 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup>. dengan kandungan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, beragam dan melimpah, sudah selayaknya potensi ekonomi berbasis kelautan yang bisa dibangkitkan digarap dengan baik. Potensi sumberdaya ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia mencakup setidaknya aspek 11 sektor, yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan pesisir (coastal forestry), (8) transportasi laut, (9) industri dan jasa maritim, (10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan (11) sumber daya alam (SDA) non-konvensional. Sektor *ekonomi* kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk ditransformasikan menjadi nilai tambah ekonomi. Nilai potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai sebesar USD 171 miliar dollar per tahun (Dekin 2013) Hingga kini kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap PDB hanya sekitar 20% (Kusumastanto, 2012) . Kehebatan sebuah bangsa tidak cukup dinilai dari ketersediaan sumberdaya alam yang dimilikinya saja, namun bagaimana kemampuan menjaga dan mengelola sehingga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini, dimana Kemaritiman menjadi titik berat dalam misi pembangunan bangsa, maka menjadikan ekonomi kelautan sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Besarnya potensi ekonomi kelautan dan letak geografis yang sangat menguntungkan tersebut seyogyanya dapat menjadi modal dasar dalam membangun *shared vision* dari seluruh pemangku kepentingan, untuk menjadikan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia sebagai paradigma utama mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Peran berbagai komponen bangsa, baik dipusat maupun di daerah sangat dibutuhkan untuk merajut program yang saling komplementer satu sama lain. Momentum kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia yang ditandai dengan penyeimbangan paradigma (*paradigm shift*) pembangunan nasional, dari *land-based development* menjadi *ocean-based development*, perlu kita terjemahkan kedalam berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, regulasi, insentif dan perencanaan lintas sektor yang terintegrasi, dan mampu menggerakkan unsur di pemerintahan, perguruan tinggi, swasta, *civil society*, dan segenap pelaku lainnya.

Penetapan bidang Kemaritiman sebagai salah satu dimensi sektor unggulan pembangunan, ditujukan untuk dalam mempercepat terwujudnya kemandirian dalam bidang ekonomi, dengan memprioritaskan bergeraknya sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terutama yang berbasis kelautan. Bergeraknya sektor-sektor strategis ekonomi domestik berbasis kelautan diharapkan dapat berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menjadikan sektor strategis domestik, diantaranya pengembangan ekonomi kelautan sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi, merupakan strategi mendasar dalam mengoptimalkan nilai tambah ekonomi dari potensi besar yang kita dimiliki. Pengembangan ekonomi kelautan dengan “menguasai laut” diarahkan pada upaya mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan (*ocean based resource*).

Arah kebijakan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan akan dilakukan dengan pengembangan industri kelautan, sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan/ maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Pembangunan kapasitas industri maritim sangat penting untuk memperkuat armada nasional serta jasa logistik laut yang saat ini masih dikuasai oleh perusahaan asing. Sumberdaya laut, khususnya perikanan akan dikembangkan dan ditingkatkan produksinya untuk mendukung kedaulatan pangan, khususnya yang bersumber dari laut. Pengembangan dan penataan pemanfaatan potensi sumberdaya laut lainnya, berupa potensi keanekaragaman hayati, potensi migas dan mineral laut perlu dieksplorasi dan ditata kelola dengan baik untuk dapat dimanfaatkan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa. Beberapa tantangan yang kita hadapi bersama diantaranya adalah bagaimana peran daerah didalam mewujudkan visi poros maritim dunia; identifikasi faktor-faktor utama yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis kelautan; bagaimana integrasi peran lintas sektor dan kerjasama pusat

daerah dalam mewujudkan program-program besar kemaritiman; dan peta persoalan utama yang masih ditemukan di tingkat daerah dalam mewujudkan tantangan pembangunan poros maritim.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis kelautan, maka perlu adanya ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, inovasi iptek dan perspektif yang kondusif masyarakat terkait kelautan. Timbulnya budaya bahari di masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, peningkatan produktifitas pengelolaan, pemberdayaan masyarakat pesisir dengan ekonomi produktif adalah beberapa hal yang dibutuhkan dalam kontek perbaikan manajemen sumberdaya laut menuju terwujudnya poros maritim.

## **II. Tujuan dan Sasaran**

1. Menguraikan faktor budaya, tinjauan sejarah dan pembelajaran, Indonesia sebagai negara maritim
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penting ekonomi maritim yang berkontribusi dalam pengembangan regional beserta tantangannya;
3. Mengidentifikasi aspek sosial ekonomi di daerah, yang berkontribusi dalam mendukung perwujudan poros maritim dunia;
4. Pengembangan kapasitas pengelolaan; dan kearifan lokal dalam manajemen sumberdaya laut

## **III. Waktu dan Tempat**

FGD akan dilaksanakan pada hari Senin, 31 Agustus 2015, bertempat di Universitas Syah Kuala banda Aceh.

**Agenda Acara Tentatif FGD  
Penyusunan Konsepsi Poros Maritim  
Senin, 31 Agustus 2015**

Waktu	Acara	Keterangan
08.00 - 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 - 09.00	Pengantar FGD  1. Kepala Bappeda Provinsi Aceh 2. Rektor Universitas Syiah Kuala 3. Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas	
09.00 - 10.30	<u>Paparan (Makalah Pembuka Diskusi):</u>  1. Dr. Muhammad Subhan, (Konektifitas Laut Regional) 2. Dr. Husaini Ibrahim, M.Pd (Sejarah Kejayaan Aceh) 3. Dr. Ir. Indra, MP (Pemberdayaan Komunitas Bahari) 4. Prof. Dr. Iskak Iskandar (Universitas Sriwijaya) (Pengembangan Potensi Perikanan Samudra) 5. Prof. Dr. Rifaldi (Universitas Riau) (Pendayagunaan Ekonomi Sumberdaya Kelautan) 6. Sekretaris Panglima Laot (Pengelolaan Kawasan Laut berbasis Kearifan Lokal)	Moderator :  Dr. Alan Koropitan  @ 15 menit/ Narasumber
10.30 - 12.30	Diskusi dan Tanggapan Floor (Pengkayaan Substansi)	Moderator
12.30 - 13.00	Kesimpulan	Deputi SDA LH
13.00	Penutup dan Makan Siang Bersama	